

ISLAMIC ECONOMICS AS A SOLUTION TO ECONOMIC GROWTH INEQUALITY IN INDONESIA: A MACRO DATA STUDY 2010–2024

EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI ATAS KETIMPANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA: STUDI DATA MAKRO 2010-2024

Mubarak¹, Muhammad Ali Afsar², Muhammad Imam Sejati³, Kurniati⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

10200123064@uin-alauddin.ac.id¹, 10200123075@uin-alauddin.ac.id²,

10200123050@uin-alauddin.ac.id³, Kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the inequality of Indonesia's economic growth during the 2010–2024 period through a review of scholarly literature and to examine the direction of national economic development from the perspective of justice and equity. The research method used is library research, relying entirely on relevant scientific journal articles as sources. The findings show that although Indonesia's macroeconomic growth remains relatively stable, equitable welfare distribution has not been optimally achieved. Income disparities and limited access to economic resources remain structural problems that hinder the inclusiveness of development. These findings emphasize that Indonesia's economic development needs to be directed toward a balance between growth and equity by prioritizing the values of justice, social responsibility, and economic sustainability. This study is expected to serve as a reference for policymakers and academics in developing development strategies that focus not only on growth figures but also on improving the quality of life and ensuring equitable welfare for all segments of society.

Keywords: *Economic Growth, Inequality, Equity, Economic Justice, Indonesia.*

ABSTRAK

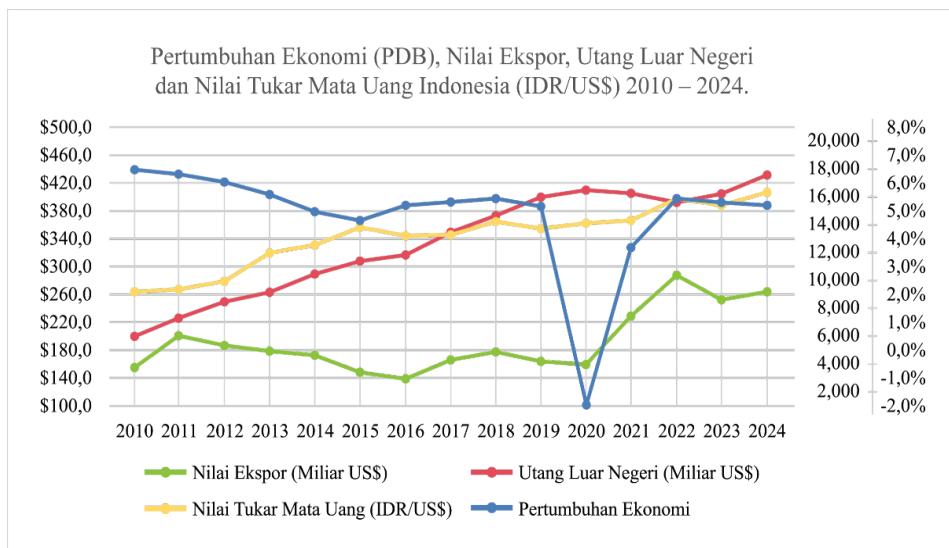
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010–2024 melalui kajian literatur ilmiah dan menelaah arah pembangunan ekonomi nasional dari perspektif keadilan dan pemerataan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang sepenuhnya bersumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia secara makro relatif stabil, pemerataan kesejahteraan belum tercapai secara optimal. Ketimpangan pendapatan dan keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi masih menjadi persoalan struktural yang menghambat inklusivitas pembangunan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia perlu diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan dengan menekankan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengembangkan strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, Pemerataan, Keadilan Ekonomi, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi isu global yang senantiasa mendapat sorotan utama dari berbagai negara di dunia. Walaupun dalam beberapa dekade terakhir pertumbuhan ekonomi global menunjukkan peningkatan, masalah tersebut tetap belum sepenuhnya teratasi. Dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan upaya pemerataan. Implementasi berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan justru seringkali memicu kesenjangan sosial di

masyarakat. Akibatnya, kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok, sementara sebagian besar masyarakat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan tanpa peningkatan taraf hidup yang signifikan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjadikan isu ini sebagai prioritas dalam pembangunan berkelanjutan, dengan memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui layanan ekonomi, kesehatan, pendidikan berkualitas, jaminan sosial, dan aspek lainnya demi terciptanya kesejahteraan sosial yang merata.



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi, Ekspor, Utang dan Kurs

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), SULNI (Bank Indonesia).

Berdasarkan data periode 2010–2024, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stabil pada kisaran 5–6% (2010–2019), kecuali tahun 2020 yang mengalami kontraksi -2,07% akibat pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terlihat pada 2021–2024, meskipun belum kembali ke level pra-pandemi dengan rata-rata pertumbuhan 5,1%. Peningkatan ekspor pada 2021–2022 juga berkontribusi terhadap pemulihan, dari 3,7% menjadi 5,3%, khususnya melalui sektor manufaktur dan sumber daya alam. Namun, lonjakan utang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi secara proporsional; pada 2013–2019 utang naik hingga 110%, sementara pertumbuhan justru turun dari 5,56% menjadi 5,02%. Hal ini terjadi karena utang yang difokuskan pada pembiayaan infrastruktur dan penanganan pandemi diikuti risiko beban bunga dan fluktuasi nilai tukar. Depresiasi rupiah di satu sisi meningkatkan daya saing ekspor (terlihat dari lonjakan ekspor 2022), tetapi di sisi lain menambah beban pembayaran utang luar negeri dan biaya impor.

Dari uraian diatas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar: stabil di angka, namun rapuh secara struktur dan tidak sepenuhnya menghadirkan keadilan meskipun indonesia mengalami pemulihan ekonomi pada tahun 2021–2022. Namun, ketergantungan terhadap ekspor berbasis sumber daya alam menjadikan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga global. Peningkatan utang luar negeri pemerintah lebih dari 110% pada 2013–2019 juga tidak sejalan dengan percepatan pertumbuhan, justru menimbulkan risiko debt overhang serta tekanan kurs rupiah.

Fenomena yang tampak saat ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan maupun kekayaan, baik di negara maju maupun berkembang yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Realitas ini menegaskan adanya kelemahan dalam konsep ekonomi yang dijalankan di berbagai negara, karena belum mampu memenuhi harapan yang diinginkan. Hal ini terbukti dari kegagalan dalam mencapai tujuan utama, seperti pemenuhan kebutuhan dasar,

penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan tidak hanya dipahami secara sempit pada dimensi materi, melainkan mencakup keseimbangan antara pembangunan fisik, mental, dan spiritual sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali. Pandangan ini kemudian diperkaya oleh Heidar Naqvi yang menekankan bahwa konsep pertumbuhan dalam Islam harus meliputi aspek moral spiritual sekaligus material. Hal tersebut mencakup dua hal utama: pertama, adanya kewajiban untuk menjamin distribusi pendapatan secara adil serta menetapkan batas kewajaran dalam tingkat pertumbuhan; kedua, menjaga keadilan antar generasi, di mana pembangunan modal fisik perlu diseimbangkan dengan investasi pada penguatan sumber daya manusia yang tangguh sebagai modal jangka panjang.

Namun Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pendekatan makro ekonomi konvensional, meliputi aspek ekspor, kurs, dan utang luar negeri. Kajian yang memadukan dinamika tersebut dengan perspektif keadilan ekonomi Islam masih perlu terus diperluas, mengingat paradigma Islam menawarkan pendekatan yang tidak hanya menekankan pertumbuhan material, tetapi juga keseimbangan moral, spiritual, dan distribusi yang adil.

Berdasarkan realitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2010–2024 menunjukkan kestabilan makro, namun belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan, ketergantungan terhadap ekspor sumber daya alam, dan peningkatan utang luar negeri menandakan lemahnya fondasi keadilan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan distributif, keseimbangan moral dan material, serta tanggung jawab sosial menjadi alternatif solusi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perspektif keadilan sosial serta menggali peran konsep pertumbuhan ekonomi Islam sebagai solusi atas krisis ketimpangan tersebut.

2. LITERATURE REVIEW

Penelitian Rahman dkk. (2025) meneliti pengaruh nilai ekspor, utang luar negeri, dan nilai tukar mata uang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010–2024, dengan tujuan mengetahui sejauh mana variabel makroekonomi tersebut berkontribusi pada dinamika pertumbuhan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekspor memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan bahwa peningkatan ekspor belum mampu mendorong pertumbuhan secara substansial karena struktur ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas primer dan rentan terhadap fluktuasi harga global. Nilai tukar rupiah juga ditemukan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, menandakan bahwa pelemahan maupun penguatan rupiah tidak memberikan dampak kuat dalam meningkatkan pertumbuhan, kemungkinan karena ketergantungan pada impor bahan baku dan beban pembayaran utang luar negeri. Sebaliknya, variabel utang luar negeri menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menguatkan teori debt overhang, dimana beban utang yang meningkat tanpa produktivitas yang memadai justru menekan kapasitas fiskal negara, menurunkan efisiensi ekonomi, dan melemahkan stabilitas makroekonomi nasional.

Secara keseluruhan, penelitian Rahman dkk. memberikan bukti empiris bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010–2024 masih dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang rapuh, khususnya ketergantungan pada utang luar negeri dan kinerja ekspor yang belum optimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan fokus studi yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat stabil secara angka namun belum mampu menciptakan pemerataan dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, literatur ini sangat relevan untuk memperkuat argumen bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan

oleh besaran variabel makro, tetapi juga oleh kualitas kebijakan pengelolaan utang, diversifikasi ekspor, dan stabilitas kurs yang berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian tersebut memberikan dasar kuat bagi kajian lebih lanjut dalam perspektif ekonomi Islam, terutama terkait prinsip keadilan distribusi, kehati-hatian fiskal, dan penghindaran praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan struktural.

Amin (2023) menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih terjadi karena distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana kelompok pemilik modal memperoleh peningkatan kesejahteraan jauh lebih besar dibandingkan kelompok pekerja. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang menuntut agar kekayaan tidak berputar hanya pada kelompok tertentu. Amin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini belum mampu menciptakan pemerataan karena tidak diiringi dengan kebijakan redistribusi yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini memperkuat pandangan tersebut melalui analisis variabel makro 2010–2024, dimana ekspor dan nilai tukar berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara utang luar negeri menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rapuh secara struktur karena bergantung pada utang dan kinerja ekspor yang tidak stabil sehingga tidak mampu mendorong pemerataan kesejahteraan. Ketika dikaitkan dengan temuan Amin (2023), terlihat bahwa akar permasalahan ekonomi Indonesia bukan hanya pertumbuhan yang lambat, tetapi juga ketidakmampuan sistem ekonomi dalam mendistribusikan hasil pertumbuhan secara adil. Dengan demikian, integrasi prinsip ekonomi Islam menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan sosial.

Artikel yang ditulis oleh Fitri dkk. (2025) dalam JIESA menegaskan bahwa ketimpangan sosial di Indonesia merupakan konsekuensi dari distribusi kekayaan yang tidak merata, lemahnya akses terhadap layanan publik, serta dominasi sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada akumulasi kapital. Dalam perspektif ekonomi Islam, masalah tersebut harus dijawab melalui mekanisme keadilan distributif yang bersumber dari nilai-nilai tauhid, khilafah, dan maslahah. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, serta pembiayaan syariah dipandang mampu menekan ketimpangan karena tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, Fitri dkk. juga menyoroti adanya hambatan struktural berupa rendahnya literasi ekonomi syariah, minimnya integrasi kebijakan, dan lemahnya koordinasi institusional, sehingga efektivitas instrumen distributif tersebut belum berjalan optimal. Temuan ini memperlihatkan bahwa keadilan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa intervensi struktural yang berbasis nilai syariah.

Selanjutnya, hasil penelitian saya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2010–2024 dipengaruhi secara terbatas oleh variabel makro seperti nilai ekspor dan nilai tukar yang hanya memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan, sementara utang luar negeri justru memberikan dampak negatif signifikan terhadap pertumbuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bersifat rapuh karena ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan volatilitas ekonomi global. Jika dibandingkan dengan temuan Fitri dkk. (2025), terlihat bahwa persoalan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas berkontribusi pada ketimpangan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi: penelitian saya menyoroti sisi makro struktural penyebab tidak stabilnya pertumbuhan, sedangkan Fitri dkk. menekankan pentingnya instrumen keadilan distributif berbasis ekonomi Islam untuk memastikan manfaat pertumbuhan dapat terdistribusi secara merata. Kombinasi keduanya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat harus diiringi dengan mekanisme distribusi yang adil untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Penelitian Anggresta dkk. (2024) memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika utang luar negeri Indonesia melalui analisis time series selama 31 tahun. Mereka menemukan bahwa variabel seperti nilai tukar dan impor berperan signifikan dalam meningkatkan akumulasi utang luar negeri, sedangkan utang tersebut tidak selalu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks beban fiskal jangka panjang, penelitian tersebut menegaskan bahwa ketergantungan pada pembiayaan eksternal berpotensi menimbulkan risiko debt overhang, dimana peningkatan utang justru menghambat kemampuan negara untuk tumbuh secara optimal. Temuan ini menekankan bahwa efektivitas utang luar negeri sangat ditentukan oleh alokasi penggunaannya serta stabilitas makroekonomi. Dengan demikian, penelitian Anggresta dkk. menggarisbawahi perlunya manajemen utang yang lebih prudent serta orientasi penggunaan utang pada sektor-sektor produktif agar tidak menciptakan beban struktural bagi perekonomian.

Hasil penelitian saya memperkuat kesimpulan tersebut dengan melihat hubungan antara utang luar negeri, nilai ekspor, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang lebih mutakhir, yakni 2010–2024. Analisis saya menunjukkan bahwa utang luar negeri memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara ekspor dan nilai tukar berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan pada pembiayaan eksternal masih menjadi persoalan struktural yang menghambat kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Anggresta dkk., terlihat adanya konsistensi bahwa utang luar negeri, apabila tidak dikelola secara produktif, cenderung menciptakan tekanan terhadap perekonomian. Oleh karena itu, literature review ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan penguatan sektor ekspor, stabilisasi nilai tukar, dan pengelolaan utang yang lebih terukur agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkat secara statistik, tetapi juga memiliki kualitas dan ketahanan jangka panjang.

Penelitian dalam jurnal *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan tata kelola etis sebagaimana digambarkan dalam prinsip ekonomi Islam. Salah satu kajiannya, yaitu *The Relevance of Ibn Khaldun's Concept of Business Ethics to the SDGs*, memperlihatkan bahwa etika bisnis yang berlandaskan keadilan, larangan eksplorasi, dan distribusi kesejahteraan yang proporsional menjadi pondasi penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Artikel tersebut menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak ditopang oleh prinsip distribusi yang adil hanya akan memperkuat ketimpangan sosial dan melemahkan stabilitas jangka panjang. Hal ini sejalan dengan pandangan para pemikir ekonomi Islam yang menyatakan bahwa mekanisme ekonomi konvensional terlalu menitikberatkan pada akumulasi modal, sehingga peran negara dan instrumen syariah diperlukan untuk memastikan manfaat ekonomi dapat tersalurkan secara merata kepada masyarakat.

Hasil penelitian saya memperkuat argumen tersebut melalui analisis terhadap pengaruh ekspor, utang luar negeri, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010–2024. Temuan saya menunjukkan bahwa ekspor dan nilai tukar memang berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara utang luar negeri terbukti memberikan pengaruh negatif dan signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bersifat rapuh dan belum mampu menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Ketika dibandingkan dengan temuan dalam jurnal *Istithmar*, terlihat bahwa persoalan ekonomi Indonesia bukan hanya terletak pada lemahnya struktur makro, tetapi juga pada belum terintegrasinya prinsip keadilan distributif dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian, literature review ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai etika ekonomi Islam agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan angka, tetapi juga keadilan dan keberlanjutan sosial.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang sepenuhnya bersumber dari artikel-artikel jurnal ilmiah terkait pertumbuhan ekonomi dan ekonomi Islam. Seluruh data, teori, serta hasil temuan diperoleh melalui penelusuran dan telaah kritis terhadap jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan membandingkan hasil-hasil penelitian terdahulu guna menemukan pola dan konsep pemikiran tentang ketimpangan ekonomi Indonesia serta solusi yang ditawarkan dalam perspektif ekonomi Islam.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Realitas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dekade 2010-2019 cenderung stabil pada kisaran 5% sampai 6%, namun terjadi penurunan drastis menjadi -2,07% pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terlihat sejak 2021 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 5,1%, meskipun belum mencapai tingkat sebelum pandemi. Stabilitas angka pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia mampu bertahan dari guncangan global, namun belum menunjukkan kekuatan struktural yang cukup solid untuk pertumbuhan yang lebih cepat dan merata.

Salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan adalah peningkatan ekspor, khususnya sektor manufaktur dan sumber daya alam yang naik dari 3,7% menjadi 5,3% pada 2021-2022. Namun, ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada sumber daya alam, yang membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga internasional. Ketergantungan ini menimbulkan risiko volatilitas yang besar terhadap pendapatan nasional dan stabilitas ekonomi.

Selain ekspor, lonjakan utang luar negeri pemerintah yang meningkat lebih dari 110% pada 2013-2019 tidak disertai percepatan pertumbuhan ekonomi yang proporsional. Sebaliknya, beban bunga dan risiko kurs rupiah yang mengalami depresiasi menambah tekanan fiskal dan berpotensi menimbulkan masalah debt overhang. Hal ini mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan utang dan ketergantungan pada pembiayaan eksternal yang kurang efisien.

Tabel 1. Hasil Analisis Goodness-of-Fit Model

	Value	df	Probability
t-statistic	1.963370	10	0.0780
F-statistic	3.854822	(1, 10)	0.0780
Likelihood ratio	4.890724	1	0.0270

Sumber: Eviews (Data diolah 2025)

Nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,078 menunjukkan bahwa angka tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi asumsi linearitas dan uji goodness-of-fit dianggap terpenuhi.

Untuk melihat keterkaitan antar variabel ekonomi tersebut, dilakukan analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Y) dan variabel independen ekspor (X1), utang luar negeri (X2), serta nilai tukar rupiah (X3) pada periode 2010–2024. Hasilnya disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Hasil Analisis Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.584420	1.987471	2.809812	0.0170
X1	0.001401	0.000764	1.834181	0.0938
X2	-0.002621	0.001028	-2.548277	0.0271
X3	0.000411	0.000343	1.199763	0.2554

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa konstanta sebesar 5,5844 mengindikasikan bahwa jika tidak terjadi perubahan pada variabel independen, yaitu nilai ekspor, utang luar negeri, dan nilai tukar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata akan berada pada tingkat 5,5844%. Variabel nilai ekspor memiliki koefisien positif sebesar 0,0014, yang berarti setiap peningkatan ekspor sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0014%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Hal ini menunjukkan bahwa ekspor memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun pengaruhnya relatif kecil.

Sementara itu, variabel utang luar negeri menunjukkan koefisien negatif sebesar -0,0026, yang menandakan bahwa setiap kenaikan utang luar negeri sebesar 1 miliar rupiah justru menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0026%, dengan asumsi faktor lain konstan. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi crowding out effect, di mana peningkatan utang yang tidak produktif dapat menghambat kapasitas fiskal negara dalam jangka panjang. Adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memiliki koefisien positif sebesar 0,0004, yang berarti depresiasi rupiah (kenaikan nilai tukar IDR/USD) sebesar 1 rupiah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0004%, dengan asumsi ekspor dan utang tetap. Meskipun pengaruhnya kecil, hasil ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah dapat memperkuat daya saing ekspor, meski efeknya terbatas karena kenaikan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri berbasis dolar.

Penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam periode 2010–2024 dipengaruhi secara berbeda oleh masing-masing variabel, di mana ekspor memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan, utang luar negeri berpengaruh negatif dan signifikan, sementara nilai tukar memberikan pengaruh positif yang relatif kecil dan tidak signifikan. Hasil ini menegaskan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih belum sepenuhnya ditopang oleh kinerja sektor eksternal, dan justru lebih rentan terhadap peningkatan beban utang yang tidak produktif. Melalui hasil tersebut dapat ditanggapi bahwa penguatan ekonomi domestik, efektivitas pemanfaatan utang, serta diversifikasi ekspor menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

4.2. Implementasi Atau Mekanisme Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Kesenjangan sosial dan ketimpangan distribusi pendapatan menjadi masalah utama lainnya, karena perkembangan ekonomi tidak dinikmati secara merata. Banyak masyarakat, terutama di lapisan bawah, masih terjebak dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan akses memadai terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini menandakan adanya kegagalan distribusi dalam sistem ekonomi yang berjalan selama ini. Dalam konteks keadilan sosial, kondisi ini menunjukkan kegagalan sistem Ekonomi Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berfokus pada keadilan distribusi dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi.

Dari sisi struktural, terdapat risiko ekonomi riil yang menyangkut inflasi, pengangguran, dan tingkat suku bunga yang saling mempengaruhi kestabilan makroekonomi. Faktor-faktor ini dapat menghambat pertumbuhan yang berkelanjutan jika tidak ditangani dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

Masalah lainnya adalah ketergantungan ekonomi pada ekspor sumber daya alam dan utang luar negeri, yang menyebabkan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Kondisi ini menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan sosial, serta berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat. Ketergantungan ini juga mempersulit penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan inklusif.

Pemulihan ekonomi yang belum solid sepenuhnya juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam investasi infrastruktur dan pengeluaran pemerintah yang belum optimal dalam meningkatkan pemerataan manfaat ekonomi ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan dalam menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan ini memperlihatkan bahwa berbagai persoalan struktural—mulai dari ketimpangan distribusi pendapatan, risiko inflasi dan pengangguran, hingga ketergantungan pada ekspor sumber daya alam dan utang luar negeri—menjadi faktor utama yang menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Indonesia belum mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan, bahkan mencerminkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip keadilan distribusi sebagaimana ditekankan dalam sistem ekonomi Islam. Selain itu, kerentanan terhadap guncangan eksternal dan belum optimalnya investasi pemerintah menegaskan bahwa struktur perekonomian masih rapuh dan tidak sepenuhnya siap menopang pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, tanggapan yang muncul dari uraian ini menekankan perlunya reformasi kebijakan yang lebih terarah pada penguatan sektor riil, peningkatan kualitas belanja negara, serta upaya serius untuk mengurangi ketimpangan sosial demi menciptakan pembangunan yang lebih adil dan menyeluruh.

4.3. Solusi Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pertumbuhan ekonomi Indonesia

Hukum Islam memiliki keunikan tersendiri karena bersumber dari dua landasan utama ajaran Islam yang kebenarannya bersifat mutlak, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi rahmatan lil-'alamin (rahmat bagi seluruh alam) serta mewujudkan kemaslahatan dan keberhasilan hidup bagi seluruh umat manusia. Pada hakikatnya, hukum Islam senantiasa relevan dan berlaku sepanjang waktu serta di setiap tempat (li kulli zaman wa makan).

Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا إِنْ يَبْتَغِ الْمُفْسِدُونَ
الْأَرْضُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat Baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, antara pertumbuhan materi dan nilai moral. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak boleh menimbulkan ketimpangan, eksloitasi, atau kerusakan sosial.

Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010–2024 menunjukkan stabilitas angka makro, tetapi belum mampu menciptakan keadilan distribusi. Masih tingginya ketimpangan sosial dan ketergantungan terhadap utang luar negeri menandakan lemahnya fondasi keadilan ekonomi. Dalam konteks ini, Islam

menawarkan kerangka solutif yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga tanggung jawab moral dan sosial.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Keadilan bersumber dari tiga prinsip utama, yaitu tauhid (pengakuan atas keesaan Allah), khilafah (tanggung jawab manusia sebagai pengelola sumber daya), dan maslahah (pencapaian kesejahteraan bersama). Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, seluruh kekayaan hakikatnya merupakan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah sebagai pengelola yang memiliki kewajiban untuk menyalurkannya secara adil dan proporsional. Menurut Al-Ghazali merupakan seorang cendekiawan dan filsuf terkenal dari abad ke-11, memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencarian keuntungan materi, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan sosial yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan kemudian dia juga mempertegas tujuan utama kegiatan ekonomi adalah mencapai kesejahteraan bersama dan kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengejar peningkatan angka PDB, melainkan harus mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Prinsip ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencerminkan nilai keadilan sosial dalam praktiknya.

Islam hadir sebagai risalah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam Islam merupakan konsep mendasar yang mencerminkan sifat utama agama ini, sekaligus menjadi cerminan ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, serta kesucian Al-Qur'an. Sebagai prinsip pokok, rahmat dipahami sebagai pemberian kebaikan yang nyata, yang menghadirkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat dengan tiga ukuran utama: kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan. Untuk mewujudkan keadilan.

Dalam ekonomi Islam memiliki perspektif khas dalam memandang persoalan ekonomi, yang berbeda dari sistem kapitalis, sosialis, maupun kombinasi keduanya. Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan individu, sekaligus memperkuat kepentingan masyarakat dengan menekankan keseimbangan antara hak publik dan hak pribadi, serta menjaga nilai-nilai moral. Ekonomi Islam sendiri merupakan upaya terstruktur untuk memahami berbagai persoalan ekonomi dan perilaku manusia berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Islam memandang bahwa kekayaan adalah amanah dari Allah SWT yang harus dikelola secara adil. Distribusi kekayaan harus memastikan kesejahteraan bersama, bukan penumpukan pada kelompok tertentu.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ فَلَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّيِّدِنَّى كُلُّهُمْ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْتُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa perang) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat ini menegaskan larangan terhadap ketimpangan ekonomi dan monopoli kekayaan. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam mengatur mekanisme pemerataan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif.

Pemikiran M. Umer Chapra menjadi dasar penting dalam membangun sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berlandaskan etika dan keadilan. Menurutnya, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama agar manfaat ekonomi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Secara umum, Chapra menjelaskan tiga prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu:

1. Keadilan Ekonomi

Menurut Chapra, ekonomi Islam harus menjamin keadilan bagi semua orang. Setiap individu, baik kaya maupun miskin, berhak menikmati hasil pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi harus mampu membagi pendapatan dengan adil, memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan, dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi.

2. Pemerataan Distribusi Kekayaan

Chapra menekankan bahwa kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Ia mendorong sistem yang bisa membagi kekayaan secara lebih merata, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, dan program ekonomi yang membantu masyarakat kecil agar lebih berdaya. Menurutnya, kesejahteraan harus dinikmati oleh semua orang, bukan hanya sebagian kelompok.

3. Sistem Keuangan dan perbankan Islam

Chapra menilai bahwa lembaga keuangan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, kejujuran, dan keadilan. Sistem keuangan Islam harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Selain itu, perbankan syariah juga harus transparan dan berorientasi pada keberlanjutan agar tidak merugikan masyarakat.

Pemikiran M. Umer Chapra sangat relevan diterapkan dalam konteks ekonomi Indonesia yang meskipun menunjukkan pertumbuhan stabil sekitar 5% selama periode 2010–2024, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan pendapatan, kemiskinan struktural, dan ketergantungan pada utang serta ekspor sumber daya alam. Prinsip keadilan ekonomi Chapra menegaskan bahwa pembangunan harus menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Konsep distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sangat relevan untuk memperkuat sektor ekonomi mikro dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia. Sementara itu, penerapan sistem keuangan syariah yang menolak riba dan menekankan keadilan serta transparansi dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga yang rentan menimbulkan krisis dan ketidakstabilan. Dengan mengintegrasikan nilai moral, etika, dan prinsip keadilan sebagaimana digagas Chapra, Indonesia berpotensi membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan, sejalan dengan cita-cita pertumbuhan yang berkeadilan dalam perspektif Islam.

لَذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يُقْوِمُ الْأَذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَمَّا مَا سَلَفَ وَأَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
هُمْ فِيهَا خَلُوْنَ .

Artinya:-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menegaskan bahwa riba merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang merusak tatanan moral dan sosial. Penyamaan antara jual beli dan riba menunjukkan kekeliruan berpikir manusia yang menafsirkan keuntungan semata-mata secara materi. Allah menegaskan perbedaan mendasar antara transaksi yang produktif dengan yang eksploratif.

Dengan demikian, larangan riba bukan hanya soal hukum finansial, tetapi juga peringatan agar sistem ekonomi berdiri di atas kejujuran, keadilan, dan keberkahan.

Muhammad Taqi Usmani, seorang ulama dan ahli hukum Islam asal Pakistan, berpendapat bahwa bunga termasuk dalam kategori riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Menurutnya, setiap tambahan atas pokok utang, berapa pun besarannya, tetap dianggap sebagai riba. Oleh karena itu, Taqi Usmani menekankan pentingnya penerapan sistem keuangan Islam yang bebas dari praktik tersebut. Ia menilai bahwa instrumen seperti mudharabah (kerja sama dengan pembagian keuntungan) dan musyarakah (kemitraan yang berbagi keuntungan dan risiko) merupakan alternatif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan syariah.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْانَتَ إِلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِصَنِّعِكُمْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat: QS. An-Nisa [4]: 58.

Ayat ini mengandung prinsip good governance dalam pengelolaan ekonomi. Dalam Tafsir Al-Iqtishadi dijelaskan bahwa makna amanah secara umum mencakup segala hal yang dipercayakan Allah SWT kepada hamba-Nya, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun keyakinan. Amanah meliputi seluruh kewajiban yang harus dijalankan, termasuk tindakan yang dilakukan maupun yang ditinggalkan, serta segala sesuatu yang dititipkan kepada seseorang. Dengan kata lain, amanah adalah segala bentuk tanggung jawab yang harus dijaga dan ditunaikan sesuai ketentuan yang telah diamanahkan.

Ibnu Khaldun menegaskan bahwa agar fungsi, manfaat, dan mekanisme perpajakan berjalan dengan baik, penerimaan dari pajak harus dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan, kemakmuran, serta pemerataan keadilan. Oleh karena itu, kebijakan pemungutan dan penggunaan pajak oleh pemerintah harus dilaksanakan secara adil dan tepat sasaran. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa keadilan merupakan pilar utama bagi kemajuan suatu negara. Menurutnya, ketidakadilan dan penindasan hanya akan melemahkan semangat pembangunan, dan pada akhirnya menyebabkan kemunduran serta kehancuran negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam dapat menjadi solusi atas krisis keadilan ekonomi nasional di Indonesia. Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ulama seperti Al-Ghazali, Muhammad Taqi Usmani, dan Ibnu Khaldun menegaskan pentingnya keadilan, amanah, dan distribusi kekayaan yang seimbang sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Islam menolak praktik riba karena dianggap merusak tatanan sosial dan moral, serta menekankan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah sebagai bentuk kerja sama yang adil dan produktif. Selain itu, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan dalam kebijakan pajak dan pengelolaan harta publik menjadi kunci kemakmuran dan kestabilan negara. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan nilai-nilai ekonomi Islam mampu memberikan arah kebijakan yang lebih berkeadilan, mendorong kesejahteraan bersama, serta memperkuat stabilitas sosial dan moral dalam sistem ekonomi nasional.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010–2024 menunjukkan ketebalahan secara angka, namun masih menyimpan persoalan mendasar dalam hal pemerataan kesejahteraan. Peningkatan ekonomi yang tercermin dalam indikator makro belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi, serta dominasi sektor tertentu menjadi tantangan utama yang menghambat terwujudnya keadilan ekonomi nasional. Kondisi ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bersifat elitis dan belum sepenuhnya berpihak pada penguatan ekonomi rakyat.

Dari hasil telaah pustaka bahwa arah pembangunan ekonomi perlu ditinjau ulang dengan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari peningkatan angka Produk Domestik Bruto, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara merata. Nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan perlu dihadirkan dalam setiap kebijakan ekonomi agar tidak menimbulkan kesenjangan baru. Dengan demikian, pendekatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama menjadi kunci dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang selama ini masih timpang.

Oleh karena itu pemerintah dan pemangku kebijakan menempatkan pemerataan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sektor produktif masyarakat, optimalisasi peran usaha mikro dan kecil, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan utang dan distribusi sumber daya. Selain itu, perlu didorong riset lanjutan yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan secara praktis dalam kebijakan publik, agar arah pembangunan Indonesia ke depan tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan secara sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Lulu Andini, Syarwani Canon, and Boby Rantow Payu, 'Analisis Pengaruh Variabel Makro Ekonomi (Inflasi, Tenaga Kerja, Investasi Dan Tingkat Pengangguran) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 2.2 (2024), 324–35 <https://doi.org/10.37905/jsep.v2i2.29163>
- Amin, Darwis, 'Pemerataan Dan Keadilan Ekonomi Di Indonesia (Perspektif Ekonomi Syariah)', *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.01 (2023), 1–17 <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5474>
- At, Faqih, Thariq Harahap, Adelia Khirani Lubis, Miftahul Jannah, Fitri Hayati, and Sumatera Utara, 'Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam , Universitas Islam Negeri', 2025
- Dewi, R Ira Laksana, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abd Hakim, 'Pandangan Terkait Riba , Bunga Bank , Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer', 4.2 (2025), 1826–37
- Fikriana Kurniati Arif, Moh. Zamroni, Rahmawan Octavianto, 'PENDEKATAN EKONOMI DALAM KAJIAN KAPITALISME UMRAH DAN HAJI FIKRIANA', 1 (2023), 1–10
- Fitrotous Sholikhah, Salsabila Uswatun Hasanah, 'PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Fitrotus', 183.2 (2023), 153–64
- Ghufran Rizqurrahman, 'ANALISIS PENGARUH INVESTASI, INFLASI, JUMLAH TENAGA KERJA, DAN PENGELUARAN NEGARA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA HANU 2000-2018', 2021
- Gunawan, Moch Hoerul, 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Islam', *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, XVI.1 (2020), 5–9
- Ilmiah, Jurnal, and Ekonomi Islam, 'Good Corporate Governance Sebagai Implementasi Amanah Dalam Al- Qur ' an (Tafsir QS . Al- Mu ' Minun)', 10.01 (2024), 1045–51

- Juli, Volume Nomor, Kurnia Fitri, Valina Sinka, Reni Ria, Armayani Hasibuan, Universitas Islam, and others, 'Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam Sebagai Solusi Untuk Ketimpangan Sosial Di Indonesia', 2025
- Mubarak, Muh. Ghazi Al-Gifari, Muhammad Ali Afsar, Kurniati, 'Reformasi Hukum Gadai Di Era Digital : Tantangan Dan Manfaatnya Mengenai Gadai Syariah Digital', 2025
- Mubarak Mubarak, Nur Resky Aulia, and Kurniati Kurniati, 'Eksistensi Taqlid Dalam Konteks Pengalaman Keagamaan Di Era Kontemporer', ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2.4 (2024), 252–62 <<https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.1004>>
- Putubasai, Erwin, and Diaz Riski Wijaya, 'Ekonomi Politik Global Dan Pengaruhnya Ketimpangan Sosial', 09.02 (2024), 53–58
- Rangkuti, Ririn Anjani, and Muhammad Arif, 'Pemikiran Ekonomi Islam M . Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer', 1.3 (2024), 348–52
- Riani, Ika Nadya, and Nelvia Iryani, 'Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat', Jurnal Ekuilnomi, 5.2 (2023), 195–205 <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.702>
- Taufikur Rahman, Baiq Saripta Wijimulawiani, and Ali Akbar Hidayat, 'Analisis Pengaruh Nilai Ekspor, Utang Luar Negeri Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2010–2024', Economic Reviews Journal, 4.2 (2025), 779–96 <https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.724>
- Zainuddin, Moch., 'PERTUMBUHAN EKONOMI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM', 1 (2017)